

## FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAK IKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PEMILU LEGISLATIF BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2019 KECAMATAN NUANGAN

*Sesi Sutasih Simbala<sup>1</sup>*  
*Marlien T. Lopian<sup>2</sup>*  
*Burhan Niode<sup>3</sup>*

### Abstrak

Ketidakikutsertaan Masyarakat masyarakat dalam sebuah pemilihan umum merupakan sebuah pilihan dari masyarakat itu sendiri namun pilihan tersebut bukanlah pilihan terbaik dalam sebuah demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi golput dalam pemilu legislatif di bolaang mongondow timur tahun 2019 kecamatan nuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Fokus penelitian ini menggunakan pendekatan teori yang dikemukakan oleh David Moon dibedakan atas 3 bagian, yaitu: Faktor sosial ekonomi, menyangkut masalah latar belakang sosial maupun keadaan ekonomi pemilih; Faktor Psikologis, menyangkut masalah ciri kepribadian seseorang atau kedekatan kepribadian seseorang terhadap calon atau kandidat dan Faktor Rasional, menyangkut rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan berdasarkan untung dan rugi serta pertimbangan-pertimbangan yang matang. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwamasyarakat yang tidak ikut memilih (nonvoting), ada beberapa masyarakat yang pada saat pemilu berlangsung mereka tidak berkenan hadir dikarenakan sedang menempuh pendidikan diluar kota, mereka menganggap bahwa tidak ada urgensi untuk ikut memilih, masyarakat Kecamatan Nuangan lebih mementingkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, terutama para nelayan dan petani. faktor psikologis merupakan salah satu pendorong yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak suaranya, dilihat dari sikap kepribadian yang apatis, intoleran, otoriter dan lain sebagainya atas partisipasi politik dari para pemilih

**Kata Kunci : Partisipasi Politik, Masyarakat, Pemilu**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun ke depan. Pada saat ini pemilu secara nasional dilakukan dua kali yaitu pemilihan anggota legislatif (Pileg), yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di Lembaga Legislatif, baik anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Di samping itu, diselenggarakan pula pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung oleh rakyat.

Indonesia sendiri pemilihan umum (Pemilu) pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Setelah amandemen ke empat Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pilpres pun dimasukkan kedalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada pemilu 2004. Pada tahun 2019 pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU dibentuk secara berjenjang, mulai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dan bersifat tetap atau permanen.

Golput atau golongan putih adalah sebutan yang dialamatkan kepada orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya atau sering pula didefinisikan kepada sekelompok orang yang tidak mau memilih salah satu partai peserta pemilu, intinya golput adalah sebutan yang dialamatkan kepada sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya.

Perilaku golput merupakan suatu sikap, kepercayaan yang terbentuk dari diri sendiri maupun pengaruh dari orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum perilaku golput disebabkan oleh orientasi perilaku para pemilih, secara umum

perilaku pemilih memiliki 3 karakteristik yaitu pertama, apatis yang disebabkan karena rendahnya sosialisasi kepada masyarakat, kedua, anomi yang memandang aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia. ketiga, aliensi yaitu perasaan ketersaingan secara aktif, pemerintah dianggap tidak memiliki pengaruh baik terhadap kehidupan seseorang.

Dalam pembahasan tentang golput tentu ada faktor-faktor yang menjadi penyebab seorang pemilih untuk tidak memilih (golput), dalam hal ini pada pemilihan umum Presiden dan anggota legislatif tahun 2019. Sesuai dengan fokus penelitian tentang golput, maka didapatkan berbagai alasan yang melatarbelakangi seseorang/individu untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu/pemilukada, diantaranya adalah ;

1. Golput teknis, hal ini dikarenakan sifat teknis berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau salah mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tak sah, atau tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan teknis pendataan penyelenggara pemilu.
2. Golput politis, hal ini untuk masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.
3. Golput ideologis, yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat didalamnya entah karena alasan nilai-nilai agama atau alasan politik-ideologi lain.

Pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perilaku golput masih cukup marak terjadi, dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat atas partisipasi politik. Peneliti berpendapat bahwa alasan utama kurangnya partisipasi masyarakat karena ketidakpahaman tentang tujuan dari pemilihan umum yang terjadi, ini ada hubungannya dengan karakteristik para pemilih yaitu apatis, anomi dan aliensi. Selain itu kurangnya kesadaran pemilih atas partisipasi politik disebabkan oleh munculnya rasa pesimisme, calon pemilih

merasa tidak ada para kandidat yang mampu mengkoordinir kepentingan mereka, serta berhalangan hadir ditempat pemungutan suara (TPS) merupakan salah satu alasan seseorang dinyatakan golput dalam pemilihan.

Data yang telah dihimpun dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada pemilihan legislative 2019, dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih khusus (DPK), dan daftar pemilih tambahan (DPTb) adalah sebesar 6562 jiwa dan yang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar 5972 jiwa berarti ada sebanyak 590 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput).

Melihat permasalahan yang terjadi pada pemilihan legislatif Kecamatan Nuangan Kabupaten Boltim 2019 terkait masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya (golput), tentunya ini menjadi ancaman yang dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Hal ini berpotensi merusak esensi dari pemilu itu sendiri yang dapat memberikan dampak negatif pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kecamatan Nuangan terutama dari kemampuannya yang dianggap tidak bisa memobilisasi masyarakat di bawahnya untuk aktif menggunakan hak suaranya. Selain merusak esensi dari pemilu itu sendiri, dampak lainnya dari golput adalah hilangnya kesempatan dari masyarakat Nuangan untuk ikut menentukan pemimpin daerahnya sendiri.

## Tinjauan Pustaka

### Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan

umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan bersertifikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya.

### Partisipasi Politik

Partisipasi Politik di negara demokrasi

Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan intensitas, biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum) besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan.

### Golongan Putih (Golput)

Menjelang pemilihan umum tahun 1977 timbul suatu gerakan di antara beberapa kelompok generasi muda terutama mahasiswa, untuk memboikot pemilihan umum karena dianggap kurang memenuhi syarat yang diperlukan untuk melaksanakan pemilihan umum secara demokratis, yang disebut antara lain ialah kurang adanya kebebasan-kebebasan yang merupakan prasyarat bagi suatu pemilihan umum yang jujur dan adil untuk melaksanakan sikap ini mereka untuk mengunjungi masing-masing tempat pemilihan umum (TPS). Menanamkan dirinya golongan putih atau golput.

Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu pertama zaman orde baru tahun 1971. Pemrakarsa sikap untuk tidak memilih itu, antara lain Arief Budiman,

Julius Usman dan almarhum Imam Malujo Sumali. Langkah mereka didasari pada pandangan bahwa aturan main berdemokrasi tidak ditegakan, cenderung diinjak-injak. Namun pemilu 1971 menurut versi pemerintahan, diikuti oleh 95 persen pemilih. Satu hal yang mencua dan kemunculan fenomena golput adalah merebaknya protes atau ketidakpuasan kelompok masyarakat tertentu terhadap tidak tegaknya prinsip-prinsip demokrasi atau penentangan langsung terhadap eksistensi rezim orde baru pimpinan soeharto.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif.

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (1 orang)
2. Masyarakat golput pemilu legislatif 2019 (13 orang setiap desa 2 orang sebanyak 11 desa)

## Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan membahas dengan menggunakan teori dari David Moon yang membahas 3 bagian yaitu:

### 1. Faktor Sosial Ekonomi

Pada pembahasan kali ini, ada empat indikator yang bisa di gunakan mengukur variable status sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan dan pengaruh keluarga. lazimnya, variable status sosial-ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku pemilih, namun dengan menggunakan proporsi yang berlawanan, pada saat yang sama variable tersebut sebenarnya juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku non-voting. Artinya, jika tinggi tingkat pendidikan berhubungan dengan kehadiran memilih, itu berarti rendahnya tingkat pendidikan berhubungan

dengan ketidakhadiran pemilih.

Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial-ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih, yang *pertama* para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadiran dalam pemilu dibanding para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Para pegawai negeri atau pensiun, menunjukkan tingkat kehadiran memilih lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Sebab, mereka sering terkena langsung dengan kebijakan pemerintah, seperti misalnya kenaikan gaji, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Begitu pula para pensiunan yang sangat berkenpentingan langsung dengan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya tentang besarnya tujuan pensiun kesehatan, kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan lainnya. *Kedua* Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping menginginkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan.

Pada penelitian kali peneliti menemukan ada beberapa indicator yang membuat masyarakat tidak ikut memilih pada pemilihan legislative 2019, yang *pertama* tingkat pendidikan, bahwa pada saat ini tidak bisa kita pungkiri pendidikan sudah cukup merambat secara adil di seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai di pelosok-pelosok desa, begitupun dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang nantinya akan berpengaruh pada masa depan anak bangsa. Pada indicator kali ini, ada beberapa masyarakat yang pada saat pemilu berlangsung mereka tidak berkenan hadir dikarenakan sedang menempuh pendidikan diluar kota, mereka menganggap bahwa tidak ada urgensi untuk pulang dan ikut memilih, ada beberapa pertimbangan yang dilakukan yaitu biaya transportasi pergi-pulang dan waktu yang

tidak banyak untuk hal itu.

Peneliti berpendapat bahwa ini perlu adanya kordinasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah (Pelaksana Pemilihan), dimana perlu adanya penegasan regulasi bagi masyarakat yang tidak turut serta pada saat pemilihan dengan alasan jauh dari lokasi pemilihan, pemerintah seharusnya mengingatkan ataupun menghimbau dari jauh-jauh hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan kepada meraka untuk segera mengurus surat pindah memilih (Form A5) agar supaya tidak terbuang sia-sia suara dari pada masyarakat. Untuk masalah pengenalan calon kandidat seharusnya di era sekarang sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengetahui para calon, teknologi informasi melalui media sosial dan website dari pemerintah merupakan wadah untuk bisa saling tahu dan mengenal lebih dekat dengan calon-calon kandidat bukan hanya figure tetapi program dan visi-misi yang tentunya menjadi faktor untuk masyarakat dalam menentukan pilihan. Selanjutnya perlu pemahaman akan politik kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dari masyarakat untuk penentuan masa depan daerah Boltim terkhususnya Kecamatan Nuangan, melalui sosialisasi kepada masyarakat guna menciptakan rasa percaya akan pemerintah dan pengetahuan akan politik kepada masyarakat.

*Kedua*, tingkat pekerjaan. pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dimana pekerjaan adalah suatu prioritas bagi kebanyakan orang-orang lebih tepatnya juga untuk masyarakat kecamatan Nuangan. Masyarakat Kecamatan Nuangan lebih memetingkan pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, terutama para nelayan dan petani. Mereka menganggap kegiatan ikut memilih hanyalah kegiatan yang sia-sia, artinya lebih penting mengutamakan urusan pribadi/keluarga yang tentunya menambah penghasilan ekonomi keluarga. Peneliti menilai keadaan yang terjadi pada masyarakat golput ini disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang politik dan

kurangnya kepercayaan kepada calon-calon kandidat atau pesimisme akan perubahan yang akan terjadi setelah pemilihan. Itulah sebabnya sebagian masyarakat Kecamatan Nuangan memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya.

Perlu adanya pendekatan dari pemerintah dan para partisipan politik kepada masyarakat seperti ini. Pendekatan secara psikologis, dilakukan dengan konsep memahami perilaku dan sikap dari para pemilih, memang tidaklah mudah ini terjadi, namun dengan sosialisasi dan pendekatan secara emosional atau secara langsung kepada masyarakat membuat munculnya rasa nyaman dan teryakini akan proses pemilihan yang terjadi. Kedekatan inilah yang menentukan seseorang ikut memilih atau tidak. Makin dekat seseorang dengan partai atau kandidat tertentu makin besar kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan.

## 2. Faktor Psikologis

Penjelasan psikologis pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori. *pertama*, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang, *kedua* berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan *pertama* melihat bahwa perilaku nonvoting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tak acuh cenderung untuk tidak memilih. Sebab, apa yang di perjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung, ataupun mungkin hal itu menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. Ciri-ciri kepribadian ini umumnya diperoleh sejak lahir bahkan lebih bersifat keturunan dan muncul secara konsisten dalam setiap perilaku.

Pada penelitian yang dilakukan di Kecamatan Nuangan terlihat ada beberapa pelaku nonvoting yang sikap dan perilaku sama seperti yang dijelaskan diatas, bahwa terlihat ketika peneliti berkunjung ke rumah

informan sudah terlihat dari cara penyambutan, sikap tidak toleran tercermin ketika peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan politik, tetapi respon yang diberikan cukup membuat peneliti merasa tidak aman. Pada dasarnya mereka cukup mengikuti bahkan kritis akan kinerja dan program-program dari pemerintah, dilihat dari argumentasi-argumentasi yang diberikan mereka cukup teliti membahas kinerja pemerintah terutama ketika jelang pemilihan legislatif, beberapa celah dan kelemahan pemerintah juga diutarakan terlihat ketidaksetujuan atas pemerintah pada saat itu. Perilaku masyarakat yang seperti itu sebenarnya sudah merupakan kepribadian yang ada dari sejak lahir artinya faktor keturunan atau gen yang mendukung hal itu terjadi, Disisi lain perilaku nonvoting ini terjadi juga karena kekecewaan dari pemerintah sebelum-sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan mereka pada saat itu. Harapan-harapan yang diinginkan pada tahun-tahun sebelumnya tidaklah terjadi sehingga membuat mereka merasa bahwa sama saja yang akan terjadi pada pemilihan legislatif 2019 saat itu.

Penjelasan *kedua* lebih menitikberatkan faktor orientasi kepribadian, penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku nonvoting disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomi, dan alienasi. Secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan jelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan (stimulus) politik, atau adanya perasaan (anggapan) bahwa aktivitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung.

Anomi merujuk pada perasaan (anggapan) bahwa aktivitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung. Anomi merujuk pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat bahwa aktivitas politik sebagai sesuatu yang

sia-sia, karena mereka merasa tidak mungkin mampu mempengaruhi peristiwa atau kebijaksanaan politik. Bagipara pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan politik seringkali berada diluar kontrol para pemilih. Aliensi merupakan perasaan keterasingan secara aktif. Seseorang merasa dirinya tidak terlibat dalam banyak urusan politik. Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh terutama pengaruh baik terhadap kehidupan seseorang. Bahkan pemerintah dianggap tidak mempunyai konsekuensi jahat terhadap kehidupan manusia. Jika perasaan aliensi ini memuncak, mungkin akan mengambil bentuk alternative aksi politik, seperti melalui kerusuhan, kekacauan, demonstrasi dan semacamnya.

Pada penelitian kali ini, peneliti mendapatkan beberapa informan yang merasa acuh tak acuh, merasa partisipasi politik yang dilakukan secara perseorangan tidak berpengaruh untuk kebijakan politik, dan merasa pemerintah tidak berpengaruh untuk kehidupan pribadi mereka. Dilihat dari ada beberapa informan yang lebih mengutamakan pekerjaan daripada harus ikut memilih, mereka menganggap bahwa hal itu hanya sia-sia dan tentunya tidaklah berpengaruh suara yang diberikan untuk pemerintah.

### 3. Faktor Rasionalitas

Pada faktor rasional ini melihat bahwa kegiatan memilih sebagai proses penilaian untung dan rugi. Pertimbangan ini digunakan pemilih atas kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah, bagi pemilih pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih. Pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi pemilihan politik seseorang. Ada

faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu, dengan begitu pemilih bukan hanya pasif melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak terbelanggu oleh karakteristis sosiologis, melainkan bebas bertindak. faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang biasa membawa perubahan lebih baik, atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih dan sebagainya.

Pada penelitian yang dilakukan di Kecamatan Nuangan menjelaskan bahwa masyarakat yang tidak ikut memilih pada pemilihan legislatif tahun 2019 cukup objektif dalam hal menentukan calon kandidat atau bahkan menentukan untuk ikut memilih atau tidak, sebagaimana dijelaskan di hasil penelitian ada beberapa informan yang merasa bahwa calon kandidat yang diusung oleh partai masih kurang mumpuni untuk menjadi wakil rakyat. Peneliti berpendapat bahwa pada pemilihan legislative 2019, masih ada partai yang dalam hal ini mengutamakan sifat kolusi, artinya hubungan kekeluargaan antara para pejabat publik masih sangat erat terjadi. Itu yang membuat kurangnya rasa percaya kepada masyarakat atas calon kandidat yang nantinya akan memimpin daerah Nuangan, dan muncul rasa pesimisme akan perubahan yang nantinya akan terjadi. Ada juga masyarakat yang cukup kecewa dengan pemilu-pemilu sebelumnya, aspirasi masyarakat yang diacuhkan oleh pemerintah membuat masyarakat merasa cukup trauma untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu tahun 2019 ini. Masyarakat menganggap bahwa itu hanyalah hal yang sia-sia dilakukan dan berpikir bahwa hasilnya tetap sama saja dengan pemilihan sebelum-sebelumnya, dan hal itu yang membuat masyarakat memutuskan untuk tidak ikut memilih dan lebih mengutamakan urusan mereka secara pribadi misalnya bekerja, menempuh pendidikan diluar kota dan lain sebagainya.

Peneliti berpendapat bahwa sebenarnya hal ini bukan sesuatu yang harus

dipermasalahan, karena semua orang berhak atas memilih dan dipilih, melihat situasi pada saat itu seharusnya para calon kandidat atau partai politik harus meyakinkan kepada masyarakat lewat kemampuan dan kapabilitas dari para calon kandidat. Para calon kandidat bisa membuktikan kepada masyarakat lewat program-program yang menguntungkan masyarakat, sosialisasi dan pendekatan secara persuasive membuat masyarakat merasa adanya kepedulian terhadap masyarakat dan tentunya bisa jadi wakil rakyat yang mengutamakan kepentingan umum dan masyarakat.

## Kesimpulan

### 1. Faktor Sosial Ekonomi

Pada faktor kali ini ada beberapa indikator yang dilihat yaitu dari tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan pengaruh keluarga. Pada penelitian yang dilakukan di Kecamatan Nuangan pada pemilihan legislatif 2019 menjelaskan bahwa masyarakat yang tidak ikut memilih (nonvoting), ada beberapa masyarakat yang pada saat pemilu berlangsung mereka tidak berkenan hadir dikarenakan sedang menempuh pendidikan diluar kota, mereka menganggap bahwa tidak ada urgensi untuk ikut memilih,

kedua masyarakat Kecamatan Nuangan lebih mementingkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, terutama para nelayan dan petani. Mereka menganggap kegiatan ikut memilih hanyalah kegiatan yang sia-sia, artinya lebih penting mengutamakan urusan pribadi/keluarga yang tentunya menambah penghasilan ekonomi keluarga. Faktor diatas dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan tentang politik dan kurangnya kepercayaan kepada calon-calon kandidat atau pesimisme akan perubahan yang akan terjadi setelah pemilihan.

### 2. Faktor Psikologis

Pada penelitian yang dilakukan di Kecamatan Nuangan menunjukkan bahwa faktor psikologis merupakan salah satu pendorong yang menyebabkan masyarakat

tidak menggunakan hak suaranya, dilihat dari sikap kepribadian yang apatis, intoleran, otoriter dan lain sebagainya atas partisipasi politik dari para pemilih. Penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa ada masyarakat yang cukup sensitif dan kritis akan kegiatan politik yang dilakukan, ini disebabkan oleh kekecewaan masyarakat atas hasil-hasil pemilu sebelumnya, dimana masyarakat merasa kurang atas perhatian daripada pemerintah tentang aspirasi-aspirasi yang diamanatkan sebelumnya. Serta pengaruh gen atau keturunan atas pribadi seseorang yang otoriter, acuh tak acuh dan tidak peduli merupakan salah satu faktor seseorang untuk tidak ikut memilih.

### 3. Faktor Rasionalitas

Pada penelitian yang dilakukan di Kecamatan Nuangan menjelaskan bahwa masyarakat yang tidak ikut memilih pada pemilihan legislatif tahun 2019 cukup objektif dalam hal menentukan calon kandidat atau bahkan menentukan untuk ikut memilih atau tidak, masyarakat merasa tidak ada keterwakilan yang bisa menjadi penyambung aspirasi mereka, artinya masyarakat merasa calon kandidat yang diusung oleh partai politik tidak cukup kompeten untuk menjadi wakil rakyat, ini disebabkan oleh praktek KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) yang dilakukan oleh partai politik, hal tersebut yang membuat masyarakat untuk tidak berpartisipasi pada pemilihan legislatif 2019.

### Saran

1. Perlu adanya kordinasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah (Pelaksana Pemilihan), dalam hal ini Komisi Pemilhan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam mensosialisasikan akan pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, yang nantinya akan menentukan pemimpin daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu perlu adanya penegasan regulasi bagi masyarakat yang tidak turut serta pada saat pemilihan dengan alasan jauh dari lokasi pemilihan umum,

KPU seharusnya mengingatkan ataupun menghimbau kepada masyarakat atas pengurusan surat pindah memilih (Form A5) sebelum hari pelaksanaan pemilihan, agar supaya tidak terbuang sia-sia suara dari pada masyarakat.

2. Kedua perlu adanya pendekatan dari pemerintah kepada masyarakat, pendekatan secara persuasif dilakukan dengan konsep memahami perilaku dan sikap dari para pemilih, dengan sosialisasi dan pendekatan secara emosional atau secara langsung kepada masyarakat membuat munculnya rasa nyaman dan teryakini akan proses pemilihan yang terjadi.
3. Seharusnya para calon kandidat atau partai politik harus meyakinkan kepada masyarakat atas kemampuan dan kapabilitas dari para calon kandidat. Para calon kandidat bisa membuktikan kepada masyarakat lewat program-program yang menguntungkan masyarakat, sosialisasi dan pendekatan secara persuasive membuat masyarakat merasa adanya kepedulian terhadap aspirasi mereka dan tentunya bisa jadi wakil rakyat yang mengutamakan kepentingan umum dan masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Ali, Novel. 1999. *Peradaban Komunikasi Politik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Asfar, Muhamaad. 2004. *Presiden Golput*. Jakarta: Jawa Pos Press
- Budiarjo, Meriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Efriza. 2012. *Political Explore*. Bandung : Alfabeta
- Furchan, Arief. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional
- Labolo Muhadam, Ilham Teguh. 2017. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Depok: Rajawali Pers
- Moleong, Lexy, J. 2009. *Metodologi*

*Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mustadin. 2018. *Golput Partisipasi Dalam Pemilu: Tinjauan Psikologi Politik*. Yogyakarta: ISBN 9786027408180

Nawawi, Hadawi. 1955. *Metode Penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Pahlevi, Indra. 2015. *Sistem Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi

Rohidi. Mulyarto. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Saksono, Gatot. 2013. *Golput dan Masa Depan Bangsa*. Jakarta: Ehipassiko

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

## **Sumber Lain**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Data Pemilihan Legislatif 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu 2019